

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa kritis 1957, fondasi bagi model pemerintahan yang kelak dinamai Sukarno sebagai "demokrasi terpimpin" mulai diletakkan. Sistem ini tidaklah kaku ia lahir dalam situasi krisis dan terus berevolusi seiring gejolak politik terhebat yang dialami Indonesia pasca-Revolusi. Dominasi Sukarno sangat mencolok dalam demokrasi terpimpin, meski gagasan awalnya juga didukung oleh pimpinan Angkatan Darat. Di mata sebagian pengamat, Sukarno tampak sebagai seorang diktator, dan gaya retorikanya yang semakin dramatis membuat yang lain memandangnya sebagai karikatur yang mulai usang. Namun, esensinya tidak sesederhana itu. Sukarno adalah seorang manipulator yang piawai, baik dalam memengaruhi orang maupun memaknai simbol. Kemampuannya menyihir massa melalui pidato maupun merangkul calon sekutu sungguh luar biasa, meski di sisi lain kebenciannya terhadap lawan-lawan politiknya juga sama tajamnya. Sukarno menawarkan suatu keyakinan kepada bangsa Indonesia sebuah harapan yang diyakini banyak orang dapat memulihkan martabat dan kebanggaan mereka serta bangsanya. Kekuatan politik utama lainnya pun berpaling padanya untuk mencari panduan, legitimasi, maupun perlindungan. Setelah tampil sebagai penengah dalam krisis 1957, posisi sentralnya kemudian diamini oleh berbagai pihak untuk dipertahankan. Sayangnya, semua itu hanya menjadi penopang bagi sebuah keseimbangan politik yang rapuh sebuah kompromi antara berbagai kepentingan yang pada hakikatnya tidak dapat didamaikan, yang pada akhirnya gagal memuaskan semua pihak.¹

¹ Merle Calvin Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since C. 1300* (Stanford University Press, 1993), 312.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), kondisi sosial-politik Indonesia ditandai oleh sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden Sukarno dan meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan dukungan militer dan partai-partai sayap kiri, Sukarno melaksanakan kebijakan “Nasakom” yang menggabungkan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam pemerintahan. Periode ini juga merupakan masa di mana Indonesia aktif dalam politik internasional yang anti-imperialis dan anti-kolonialis, khususnya dalam menolak segala bentuk pengaruh Barat yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Asia-Afrika dan dunia ketiga pada umumnya.²

Langkah menuju pembentukan Federasi Malaysia Raya secara resmi dimulai pada 27 Mei 1961, ketika Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, mengusulkan perlunya "pemahaman yang lebih erat" antara Malaya, Singapura, Borneo Utara, Brunei, dan Sarawak. Proposal ini, yang merupakan kontras dengan penentangan Tunku sebelumnya terhadap penggabungan dengan Singapura, didorong oleh kebutuhan strategis mendesak. Pendorong utama adalah krisis politik di Singapura. Menyusul kekalahan PAP (Partai Aksi Rakyat) pimpinan Lee Kuan Yew dalam pemilihan sela Hong Lim pada April 1961 dan pembelotan yang melahirkan Barisan Sosialis, para pemimpin Malaya khawatir Singapura akan jatuh ke tangan Komunis. Bagi mereka, penggabungan adalah satu-satunya cara untuk menerapkan langkah-langkah keamanan internal yang efektif dan mencegah Singapura menjadi "Kuba yang lain". Lee Kuan Yew sendiri mengakui bahwa tanpa penggabungan segera, Singapura akan menjadi merdeka dan Komunis dalam waktu dekat. Namun, Tunku menuntut syarat tegas, yaitu wilayah Borneo harus dimasukkan untuk mengimbangi jumlah penduduk Tionghoa di Singapura, memastikan supremasi politik Melayu

² Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern* (Gadjah Mada University Press, 1991), 511–13.

tetap terjaga dalam federasi baru (diperkirakan Tionghoa hanya 42% dari total populasi).³

Pembicaraan antara Malaya dan Inggris pada akhir 1961 diwarnai tarik-ulur yang rumit. Inggris menuntut hak penuh atas pangkalan militernya di Singapura untuk tujuan pertahanan Persemakmuran dan SEATO (*South East Asian Treaty Organization*). Tunku, sebagai taktik tawar-menawar, mengancam pangkalan tersebut tidak akan berada di bawah SEATO, sementara pada saat yang sama mendesak Inggris untuk segera berkomitmen pada masuknya wilayah Borneo.⁴

Pada 23 November 1961, negosiasi membuahkan hasil. Kedua pemerintah menyatakan pembentukan Malaysia adalah "tujuan yang diinginkan" dan sepakat akan ada perpanjangan Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya, di mana pangkalan Singapura dapat digunakan untuk pertahanan Persemakmuran dan "pemeliharaan perdamaian di Asia Tenggara" (frasa samar yang diyakini Inggris mencakup penggunaan SEATO). Yang paling penting, sebuah Komisi Penyelidikan bersama (kemudian dikenal sebagai Komisi Cobbold) diumumkan untuk meninjau opini rakyat di Sarawak dan Borneo Utara, sebagai mekanisme untuk memenuhi persyaratan penentuan nasib sendiri.⁵

Sukarno khawatir dengan pembentukan Malaysia akan menjadi sarana bagi Inggris untuk mempertahankan kontrol kolonial secara tidak langsung di kawasan tersebut. Kekhawatiran ini didasari oleh posisi strategis Malaysia yang berdekatan dengan Indonesia dan potensi ancaman terhadap stabilitas politik dalam negeri Indonesia, khususnya dengan adanya pengaruh Barat yang kuat di kawasan Asia Tenggara.⁶

³ Matthew Jones, *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2001), 65–66, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511497346>.

⁴ Jones, *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965*, 75.

⁵ Jones, *Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965*, 76.

⁶ Marsita Omar, "Indonesia-Malaysia Confrontation," *National Library Board Singapore*, n.d., <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuid=78909a3d-b4c3-4ee8-a1f3-9d3b56c00213>.

Rencana pembentukan Federasi Malaysia yang digagas Malaya, Singapura, dan Inggris sebagai solusi atas masalah kemerdekaan Singapura, kekhawatiran demografis minoritas Tionghoa, dan masa depan wilayah Kalimantan, justru memicu penolakan dari Indonesia yang telah lama memiliki hubungan ambivalen dengan Malaya sejak 1957 ditandai oleh kecurigaan atas pengaruh Inggris, kecemburuan ekonomi, dan dukungan Malaya terhadap pemberontakan PRRI. Bagi Jakarta, federasi ini dianggap sebagai proyek neo-kolonial yang mengukir keberadaan basis Inggris sekaligus membuka peluang dominasi komunitas Tionghoa Singapura dan pengaruh komunisme. Penolakan juga mengemuka di Kalimantan, terutama melalui pemberontakan yang dipimpin Azahari di Brunei pada Desember 1962 yang menginginkan kemerdekaan Kalimantan Utara gerakan yang kemudian diambil alih oleh intelijen Indonesia di bawah Subandrio. Situasi ini memuncak pada Januari 1963 ketika Sukarno secara resmi menolak rencana Malaysia dan Subandrio mendeklarasikan kebijakan "konfrontasi" sebagai bentuk perlawanan Indonesia.⁷

Kekhawatiran akan terbentuknya Federasi Malaysia semakin nyata ketika pada tahun 1963, Sukarno meluncurkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat), yang berisi perintah untuk menentang pembentukan negara "boneka" Malaysia yang dianggap mengancam kedaulatan Indonesia.⁸ Konfrontasi Indonesia-Malaysia pun dimulai, yang mencakup upaya infiltrasi militer dan serangkaian propaganda anti-Malaysia di media domestik. Subandrio, Menteri Luar Negeri saat itu, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan "konfrontasi" terhadap Malaysia sebagai bentuk perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme Barat yang dibawa oleh Inggris.⁹

⁷ Greg Poulgrain, *The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei and Indonesia, 1945-65* (Crawford House, 1998). Xvii

⁸ J. A. C. Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute, 1963-1966* (Australian Institute of International Affairs, 1974), 4.

⁹ "Indonesia Confrontation," *National Museum Australia*, n.d., <https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/indonesian-confrontation>.

Sukarno memainkan peran sentral dalam mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia dari non-blok menuju konfrontasi aktif selama era Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Kebijakan ini didorong oleh nasionalisme radikal, keinginan membangkitkan martabat bangsa pasca-kolonial, dan keyakinan pada perjuangan revolusioner melawan "nekolim" (neo-kolonialisme, kolonialisme, imperialisme).¹⁰ Sukarno melihat diri dan Indonesia sebagai pemimpin "kekuatan baru" yang harus menghancurkan pengaruh Barat di Asia-Afrika. Di dalam negeri, Sukarno menyeimbangkan kekuatan militer (yang anti-PKI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menjaga stabilitas. Konsep Nasakom (nasionalis, agama, komunis) menjadi landasan ideologisnya, meski menuai kritik dari dalam maupun luar negeri. Walaupun dituduh condong ke komunisme Tiongkok, ia percaya kebijakannya berakar pada nasionalisme Indonesia, bukan kepentingan asing.¹¹

Malaysia memandang upaya penggagalan pembentukan Federasi Malaysia (yang direncanakan terdiri atas Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak) sebagai bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan dan stabilitas regional yang sedang dibangun. Pemerintah Malaya di bawah Tunku Abdul Rahman menilai keberatan yang diajukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap rencana federasi itu sebagai intervensi terhadap urusan dalam negerinya. Bagi Kuala Lumpur, gagasan Federasi Malaysia bukanlah proyek ekspansionis, melainkan sarana untuk mempercepat dekolonisasi dan mengamankan kawasan dari pengaruh komunis yang kian menguat di Asia Tenggara pasca Krisis Laos dan perkembangan di Vietnam.¹²

Menanggapi tuduhan dan tekanan diplomatik dari negara-negara tetangga, Malaysia berupaya menegaskan legitimasi politik dan hukumnya

¹⁰ Frederick P. Bunnell, "Guided Democracy Foreign Policy: 1960-1965 President Sukarno Moves from Non-Alignment to Confrontation," *Indonesia* 2 (October 1966): 37-39, <https://doi.org/10.2307/3350755>.

¹¹ Bunnell, "Guided Democracy Foreign Policy," 39-41.

¹² Hamilton Fish Armstrong, "The Troubled Birth of Malaysia," *Foreign Affairs* 41, no. 4 (1963): 680, <https://doi.org/10.2307/20029652>.

melalui jalur internasional. Salah satu langkah konkret adalah dengan membawa persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian mengirim misi pencari fakta ke Sabah dan Sarawak pada 1963. Laporan PBB yang menyatakan bahwa sebagian besar rakyat di dua wilayah tersebut mendukung integrasi ke dalam Federasi Malaysia menjadi dasar hukum yang memperkuat posisi Kuala Lumpur. Dalam narasi resmi Malaysia, hal ini dipandang sebagai bukti bahwa pembentukan federasi bukan hasil tekanan kolonial Inggris, melainkan aspirasi rakyat lokal yang sah untuk membentuk negara merdeka dalam bingkai baru.¹³

Setelah konfrontasi terbuka dengan Indonesia dimulai pada akhir 1963, respon Malaysia bergeser dari diplomasi ke pertahanan diri. Pemerintah Malaysia, dengan dukungan Inggris dan Persemakmuran, mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga perbatasan Kalimantan serta melancarkan kampanye diplomasi di dunia internasional guna menampilkan Indonesia sebagai pihak agresor. Di sisi lain, Malaysia berusaha menunjukkan diri sebagai negara yang moderat dan berorientasi kerja sama regional, sebagaimana terlihat dalam keterlibatannya di *Association of Southeast Asia* (ASA) dan kemudian ASEAN setelah konfrontasi mereda. Perspektif Malaysia terhadap periode ini umumnya menggambarkan diri mereka sebagai korban provokasi politik regional yang berhasil bertahan melalui legitimasi hukum, dukungan internasional, dan upaya memperkuat solidaritas Asia Tenggara pasca-konfrontasi. Inggris bersama dengan negara-negara persemakmurannya di kawasan Asia Pasifik yaitu Australia dan Selandia Baru, memandang serius ancaman yang dilontarkan oleh Indonesia. Sebagai respon, mereka meningkatkan pengawasan di perbatasan utara Borneo dan bahkan melakukan operasi militer untuk menjaga stabilitas di wilayah Asia Tenggara. Respon ini terkait erat dengan situasi global di mana Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Inggris dengan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni

¹³ Armstrong, "The Troubled Birth of Malaysia," 686.

Soviet sedang mencapai puncaknya. Inggris dan negara-negara sekutunya khawatir akan potensi penyebaran komunisme di Asia Tenggara jika pengaruh Barat melemah, dan Konfrontasi ini dianggap sebagai ancaman yang bisa memperkuat komunisme di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, upaya Indonesia dipandang sebagai tantangan terhadap kebijakan *Containment*¹⁴ yang diterapkan oleh Amerika Serikat dalam menahan pengaruh komunis.¹⁵

Pemberitaan mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia tersebar luas di media nasional dan internasional, terutama di Inggris dan negara-negara Persemakmuran dan negara yang terlibat dalam konfrontasi.

Media di Indonesia, contohnya seperti surat kabar *Bintang Timur* yang dimiliki oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), memainkan peran sentral dalam membingkai konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963–1965. Surat kabar ini tidak hanya menjadi corong informasi, tetapi juga alat propaganda yang sistematis untuk membangun opini publik dan menggalang dukungan terhadap kebijakan Presiden Sukarno. Pembingkai yang dilakukan *Bintang Timur* sangat dipengaruhi oleh ideologi anti-imperialisme dan nasionalisme revolusioner, serta didukung penuh oleh pemerintah melalui regulasi yang membatasi media lain yang berseberangan.¹⁶

Media massa Inggris, misalnya, memberitakan Konfrontasi ini sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan dan menggambarkan Indonesia

¹⁴ Containment adalah kebijakan luar negeri strategis yang dijalankan oleh Amerika Serikat mulai akhir 1940-an untuk membendung kebijakan ekspansionis Uni Soviet. Istilah ini digagas oleh perancang utama kebijakan tersebut, diplomat AS George F. Kennan, yang menulis dalam sebuah artikel anonim di majalah *Foreign Affairs* edisi Juli 1947. Dalam tulisannya, Kennan menyatakan bahwa AS harus menerapkan "kebijakan containment jangka panjang yang sabar namun tegas dan waspada terhadap kecenderungan ekspansif Rusia", dengan harapan rezim Soviet akan melunak atau runtuh. Britanica, Containment Policy, [Containment | Definition & Facts | Britannica](#) diakses pada 20/05/2025.

¹⁵ Geoff Wade, "The Beginnings of a 'Cold War' in Southeast Asia: British and Australian Perceptions," *Journal of Southeast Asian Studies* 40, no. 3 (2009): 543–63.

¹⁶ Samsul Kamil Osman et al., "Propaganda of the Bintang Timur Newspaper during the Indonesia-Malaysia Confrontation, 1963-1965," *JAWI* 7, no. 2 (2024): 79, <https://doi.org/10.24042/jawi.v7i2.24698>.

dengan narasi negatif sebagai negara yang agresif dan berbahaya bagi Malaysia. Surat kabar seperti The Scotsman, The Coventry Evening Telegraph, Belfast Telegraph dan lain-lain, sering menarasikan dalam editorialnya satire dan juga kritikan terhadap kebijakan-kebijakan Indonesia bahkan pribadi Sukarno sebagai pemimpin yang dianggap egois dan keras kepala.

Adapun media Malaysia sendiri dalam banyak editorialnya seperti Berita Harian dan The Straits Times pada masa itu, sering sekali menggambarkan keadaannya sebagai negara yang dizalimi oleh tetangga sendiri. Malaysia diposisikan sebagai korban dari aksi pemecah belahan bangsa oleh Indonesia sebagai negara jirannya.

Banyaknya perspektif dari pemberitaan satu peristiwa konfrontasi ini memuat juga opini dan representasi publik terhadap apa yang terjadi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana surat kabar Britania dan Federasi Malaysia, membingkai pemberitaan mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dengan menelaah bagaimana media Britania dan Federasi Malaysia menyajikan narasi tentang konflik ini, dengan menggunakan analisis *framing*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media internasional dalam membentuk persepsi publik dan pengaruhnya terhadap hubungan diplomatik antar negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kesenjangan historiografi Indonesia dengan menyediakan perspektif Britania dan Federasi Malaysia mengenai Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini ditemukan permasalahan utama. Adapun masalah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana jalannya Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1966 ?

2. Bagaimana pemberitaan surat kabar Britania dan Federasi Malaysia membingkai tentang Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1966?

C. Tujuan Masalah

Dari permasalahan yang diangkat Penulis tentunya akan menjawabnya dengan tujuan :

1. Menguraikan bagaimana jalannya Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1963-1966.
2. Menjelaskan bagaimana surat kabar Britania dan Federasi Malaysia menarasikan pemberitaan Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966.

D. Kajian Pustaka

Penelitian dengan tema Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 bukanlah merupakan penelitian yang baru akan tetapi, tentunya antara satu penelitian dengan penelitian lain *novelity* atau kebaruan harus diperhatikan untuk menjauhi plagiarisasi. Dalam kajian pustaka Penulis telah membaca dan menelaah beberapa penelitian dengan topik yang serupa dan mengkomparsi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis diantaranya sebagai berikut:

1. "*Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia*" (2002) oleh Matthew Jones. Diantara isi buku ini membahas peran Inggris dan Amerika Serikat dalam konflik Konfrontasi, terutama dalam konteks Perang Dingin. Jones menjelaskan bagaimana kebijakan Inggris dan sekutu di kawasan Asia Tenggara difokuskan untuk menghambat ekspansi komunisme, yang sejalan dengan tujuan penelitian ini, memfokuskan perspektif media internasional. Perbedaan utama adalah bahwa penelitian Jones berfokus pada strategi diplomasi Inggris, sementara penelitian yang akan disusun

mengkaji bagaimana media membingkai konflik ini. Buku ini memberikan konteks yang relevan mengenai pandangan negara Barat terhadap Konfrontasi, yang akan memperkaya landasan teoritis dalam menganalisis pemberitaan media Britania dan Federasi Malaysia tentang Konfrontasi.

2. *Japan's Diplomatic Response to Indonesia's Policy of Confronting Malaysia (1963–1966)* James Llewelyn (2005). Penelitian Llewelyn menyoroti dinamika diplomasi Jepang terhadap Indonesia selama masa Konfrontasi dengan menekankan kepentingan strategis dan ekonomi Jepang di Asia Tenggara. Kajian ini menggambarkan Jepang sebagai mediator yang berhati-hati, berupaya menjaga stabilitas kawasan demi keberlanjutan perdagangan dan akses sumber daya. Fokusnya berada pada kebijakan tingkat negara, berbasis dokumen diplomatik dan wawancara pejabat, sehingga lebih bersifat politik-elit dan makro. Llewelyn tidak menelaah bagaimana wacana Konfrontasi dipersepsikan melalui media massa, khususnya dari sisi representasi publik di Jepang, Inggris, atau Malaysia. Di sinilah celah penelitian Penulis bukan pada diplomasi antarnegara, melainkan pada diplomasi media, bagaimana surat kabar membingkai dan membentuk opini internasional tentang Konfrontasi melalui analisis *framing*.
3. *Propaganda of the Bintang Timur Newspaper during the Indonesia–Malaysia Confrontation (1963-1965)* Samsul Kamil Osman dkk. (2024). Studi ini berfokus pada bagaimana surat kabar *Bintang Timur*, milik Partai Komunis Indonesia (PKI), digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung kebijakan “Ganyang Malaysia.” Pendekatan yang digunakan adalah metode sejarah dengan analisis isi terhadap teks dan karikatur, menunjukkan bagaimana media komunis membentuk sentimen anti-Malaysia di kalangan rakyat Indonesia. Penelitian ini bersifat monoperspektif karena hanya menelaah media dari satu pihak (Indonesia) dan belum menelusuri

bagaimana media luar negeri merespons atau mengontruksi narasi tandingan. Penelitian Penulis melengkapi kekosongan ini dengan membandingkan bingkai wacana antara media Britania dan Federasi Malaysia, menunjukkan bagaimana opini internasional terbentuk secara saling memengaruhi. Dari segi metodologi, penggunaan teori *framing* konsep Robert N. Entman dalam penelitian Anda juga menghadirkan analisis yang lebih sistematis dibanding deskripsi historis pada penelitian Osman dkk.

4. *Amerika Syarikat dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966* Sah-Hadiyatan Ismail (2016). Artikel ini menelusuri kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dengan fokus pada hubungan diplomatik dan keterikatan Amerika melalui perjanjian ANZUS dan SEATO. Peneliti menunjukkan bahwa Amerika bersikap berhati-hati mendukung stabilitas Malaysia, menahan diri dari intervensi langsung, dan berupaya menahan penyebaran komunisme. Fokusnya berada pada level kebijakan internasional dan struktur politik keamanan, bukan pada aspek komunikasi atau konstruksi opini publik.
5. *“How Do Indonesians Remember Konfrontasi? Indonesia–Malaysia Relations and the Popular Memory of “Confrontation” after the Fall of Suharto”* Budiawan (2017). Artikel Budiawan mengkaji bagaimana masyarakat Indonesia mengingat Konfrontasi setelah jatuhnya Orde Baru, dengan menyoroti perbedaan antara *national memory* versi negara dan *popular memory* di masyarakat. Ia menggunakan pendekatan studi budaya dan teori memori sosial untuk menjelaskan bagaimana retorika “Ganyang Malaysia” terus hidup dalam wacana publik modern. Namun, fokus temporalnya adalah pasca-1998 dan tidak membahas konstruksi wacana saat peristiwa Konfrontasi berlangsung. Di sinilah perbedaan mendasar dengan penelitian Penulis Budiawan meneliti ingatan kolektif di masa kini, sedangkan Penulis meneliti pembentukan wacana asalnya

di masa 1963-1966. Dengan menggabungkan metode sejarah diakronis dan analisis *framing*.

E. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang akan dilakukan adalah kajian literatur dengan tetap menggunakan metode penelitian sejarah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian sejarah adalah tahapan pengumpulan sumber (Heuristik), verifikasi sumber (Kritik), interpretasi dan historiografi. Uraian rencana tersebut adalah sebagai berikut.

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap pertama dalam penelitian sejarah dalam tahapan ini penyusun melakukan penjajakan, pencarian dan pengumpulan sumber yang akan diteliti.¹⁷ Adapun sumber-sumber tersebut didapatkan dari situs web *British Newspaper Archive* yang merupakan mitra *The British Library* dalam pendigitalisasian koleksi surat kabar Britania juga dari *eResources National Library Board Singapore* yang menyediakan surat kabar lama yang telah didigitalisasi.

Setelah sumber penelitian berhasil didapatkan dalam tahapan penelitian penulis harus mengklasifikasikan sumber ini berdasarkan sifatnya yaitu Sumber Primer dan Sumber Sekunder. Berikut klasifikasi sumber yang Penulis lakukan :

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang tingkat keotentikannya sangat tinggi, beberapa kriteria sumber primer yang digunakan adalah sumber tersebut merupakan benda, tulisan, audio visual atau sumber lisan yang sezaman dengan

¹⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Pustaka Setia, 2014), 93–94.

peristiwa yang diteliti, yang artinya sumber tersebut berasal dari pelaku atau saksi sejarah.¹⁸

1) Sumber Tulisan

a) Surat Kabar

1. *Tudohan berat tanpa bukti dari Indonesia* (Berita Harian, 24 Januari 1963, Halaman 4).
2. *PULOHAN RIBU KUTOK SUKARNO* (Berita Harian, 7 Oktober 1963, Halaman).
3. *Sukarno's Three-Pronged Offensive- By Tengku* (The Straits Times, 12 Desember 1963).
4. *Confrontation* (The Scotsman, 25 Januari 1964).
5. *BUKTI2 PENGGANAS2 DATANG DARI INDONESIA* (Berita Harian, 23 Agustus 1963, Halaman 1).
6. *Paratroopers from Indonesia Dropped in Malaya* (The Conventry Evening Telegraph, Selasa 02 September 1964).
7. *More Indonesians Captured- Arms siezed by Troops* (The Scotsman, 22 September 1964).
8. *Briton Killed in Sarawak Action- "Heavy Attack"* (The Scotsman, 28 April 1965).
9. *Baik bagi negeri kita: Tun* (Berita Harian, 4 Oktober 1965, Halaman 1).
10. *Indonesia Melts* (The Scotsman, 28 Mei 1965).
11. *Zaman baru hubungan Indonesia-Malaysia* (Berita Harian, 12 Agustus 1966, Halaman 4).

¹⁸ Metodologi Penelitian Sejarah, 96.

12. *Jakarta, Manila to Be Asked to Clarify* (The Straits Times, 17 September 1963).
13. *Perhubungan diplomatik putus dengan Indonesia* (Berita Harian, 18 September 1963).
14. *BERIBU2 RA'AYAT TUNJOK PERASAAN DI-KEDUTAAN INDONESIA, BAKAR GAMBAR SUKARNO, RAMPAS BHINEKKA TUNGKAL IKA* (Berita Harian 18 September 1963).
15. *70 Soldiers Killed-Claim* (Belfast Telegraph, 16 Juli 1964).
16. *Clash in Malaya with Indonesian Paratroopers* (The Conventry Evening Telegraph, 7 September 1964).
17. *Singapore Death Rise to 12* (The Conventry Evening Telegraph, 7 September 1964).

b) Arsip

1. *United Nations Treaty Registered 550-I-8029.*
2. *Letter dated 20 January 1965 from the First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Indonesia addressed to the Secretary-General S/6157.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang penggunaannya dalam penelitian sejarah adalah sebagai pembantu dalam interpretasi dan historiografi. Sumber tersebut merupakan benda, tulisan, audio visual atau sumber lisan yang berkaitan

dengan sebuah peristiwa namun tidak sezaman (bukan dari pelaku atau saksi sezaman).¹⁹ Adapun sumber sekunder utama yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) J. A. C. Mackie, *Konfrontasi : The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. Oxford University Press. London 1974
- 2) Matthew Johnes, *Conflict and Confrontation in South East Asia 1961-1965: Britain, the United States, Indonesia and the Creation of Malaysia*. Cambridge University Press. 2002

2. Kritik

Dalam tahapan ini, setelah Penulis mengumpulkan sumber yang relevan dengan topik penelitian selanjutnya adalah memverifikasi sumber dengan tujuan untuk memeriksa dan memastikan bahwa sumber yang digunakan otentik dan faktual. Kritik terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal merupakan cara verifikasi dan pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah yang digunakan, dengan tujuan untuk menentukan otentisitas secara fisik dari sumber yang digunakan.²⁰

- 1) Sumber Tertulis Surat Kabar
 - a) *Tudohan berat tanpa bukti dari Indonesia* (Berita Harian, 24 Januari 1963, Halaman 4). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang

¹⁹ *Metodologi Penelitian Sejarah*, 96.

²⁰ *Metodologi Penelitian Sejarah*, 103.

merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

b) *PULOHAN RIBU KUTOK SUKARNO* (Berita Harian, 7 Oktober 1963, Halaman). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

c) *Library Sukarno's Three-Pronged Offensive- By Tengku* (The Straits Times, 12 Desember 1963). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

d) *Confrontation* (The Scotsman, 25 Januari 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.

e) *BUKTI2 PENGGANAS2 DATANG DARI INDONESIA* (Berita Harian, 23 Agustus 1963, Halaman 1). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang

merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

- f) *Paratroopers from Indonesia Dropped in Malaya* (The Coventry Evening Telegraph, Selasa 02 September 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- g) *More Indonesians Captured- Arms siezed by Troops* (The Scotsman, 22 September 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- h) *Briton Killed in Sarawak Action- "Heavy Attack"* (The Scotsman, 28 April 1965). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- i) *Baik bagi negeri kita: Tun* (Berita Harian, 4 Oktober 1965, Halaman 1). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang

merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

- j) *Indonesia Melts* (The Scotsman, 28 Mei 1965). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- k) *Zaman baru hubungan Indonesia-Malaysia* (Berita Harian, 12 Agustus 1966, Halaman 4). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.
- l) *Jakarta, Manila to Be Asked to Clarify* (The Straits Times, 17 September 1963). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.
- m) *Perhubungan diplomatik putus dengan Indonesia* (Berita Harian, 18 September 1963). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang

merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.

- n) *BERIBU2 RA'AYAT TUNJOK PERASAAN DI-KEDUTAAN INDONESIA, BAKAR GAMBAR SUKARNO, RAMPAS BHINEKKA TUNGGAL IKA* (Berita Harian 18 September 1963). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web eresources.nlb.gov.sg/newspaper yang merupakan situs surat kabar digital *National Library Board Singapore*.
- o) *70 Soldiers Killed-Claim* (*Belfast Telegraph*, 16 Juli 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- p) *Clash in Malaya with Indonesian Paratroopers* (*The Coventry Evening Telegraph*, 7 September 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.
- q) *Singapore Death Rise to 12* (*The Coventry Evening Telegraph*, 7 September 1964). Lembar halaman surat kabar ini ada dalam kondisi bagus, terbaca dan kertas lengkap tidak ditemukan kecacatan. Surat kabar ini ditemukan di situs web

britishnewspaperarchive.co.uk yang merupakan web mitra *British Library*.

2) Sumber Tertulis Arsip

a) *United Nations Treaty Registered 550-I-8029*.

Lembar halaman pada arsip ini dalam kondisi bagus, terbaca dan tidak ada kecacatan cap dan tulisan sesuai dengan standar PBB pada masa itu. Ditemukan di situs web United Nations Treaty Collection yang merupakan situs resmi kumpulan perjanjian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b) *Letter dated 20 January 1965 from the First*

Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Indonesia addressed to the Secretary-General S/6157. Lembar halaman pada arsip ini dalam kondisi bagus, terbaca dan tidak ada kecacatan cap dan tulisan sesuai dengan standar PBB pada masa itu. Ditemukan di situs web <https://digitallibrary.un.org/> yang merupakan situs resmi perpustakaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b. Kritik Internal

Kritik internal merupakan salah satu langkah yang wajib dalam penelitian sejarah. Kritik internal berkenaan dengan isi dari sumber tersebut apakah sumber tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan? dan berdasar pada kesaksian dan mengetahui arti sebenarnya dari kesaksian tersebut.²¹

²¹ *Metodologi Penelitian Sejarah*, 104.

Dalam arti lain kritik internal bertujuan untuk menguji kredibilitas sumber sejarah yang digunakan. adapun cara yang digunakan dalam kritik internal adalah dengan memeriksa apakah pernyataan didalam sumber sejarah tersebut bersifat historis atau tidak dan sesuai dengan realita sejarah atau tidak. Dikarenakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini hanya sumber tulisan dari surat kabar dan arsip, kritik sebagian besar ditinjau dari penggunaan bahasa dan tata bahasa, situasi penulisan, ide penulisan dan komparasi data.

Sebagai contoh artikel berjudul **“Confrontation”** dalam editorial The Scotsman edisi 25 Januari 1964 Penulis menggunakan gaya bahasa jurnalisme naratif-analitis yang khas koran serius (*broadsheet*) Inggris.

Penggunaan kata sifat seperti *"harsh"* (kasar) untuk menyifati kebijakan Sukarno dan *"squandered"* (menghamburkan) untuk bantuan ekonomi AS, bertujuan membangun citra negatif terhadap pemerintah Indonesia. Penulis menggunakan kalimat tanya retorik, seperti *"Is Malaysia to be accounted expendable...?"* (Apakah Malaysia harus dianggap sebagai sesuatu yang bisa dikorbankan...?). Ini adalah teknik persuasi untuk memicu rasa urgensi dan ketakutan pada pembaca Inggris mengenai nasib Federasi Malaysia. Struktur Pasif-Aktif, Tindakan Indonesia sering digambarkan dengan kata kerja aktif yang bermakna agresi (*confronts, subversion, infiltration*), sementara pihak Barat (Inggris/AS) dicitrakan dalam posisi reaktif atau defensif.

Artikel ini ditulis pada Januari 1964, momen yang sangat krusial, Penulisan dilakukan tepat saat Robert

Kennedy (Jaksa Agung AS) sedang melakukan tur diplomasi ke Tokyo, Manila, dan Jakarta. Situasinya adalah "ketidakpastian" (apakah akan perang total atau gencatan senjata). Terlihat juga Tekanan Domestik, Pemerintah Inggris saat itu berada di bawah tekanan besar karena harus menanggung biaya militer di Kalimantan. Penulis artikel berada dalam situasi perlu "mengingatkan" publik mengapa keterlibatan Inggris di Asia Tenggara itu penting, sekaligus mengkritik sekutu mereka (AS) yang dianggap terlalu lembek.²²

Jika kita membandingkan data dalam teks dengan catatan sejarah resmi:

Pertama, Teks menyebut bantuan AS sebesar \$100 juta per tahun. Secara historis, ini akurat. AS memang memberikan bantuan melalui program USAID dan bantuan militer terbatas hingga akhirnya dihentikan total pada tahun 1965.²³ Kedua, Penyebutan "*cease-fire*" yang sedang dinegosiasikan merujuk pada kesepakatan gencatan senjata Januari 1964 yang memang gagal karena ketidaksamaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia.²⁴

Kesimpulannya, artikel ini **kredibel** sebagai sumber untuk memahami pandangan publik dan media Inggris terhadap Konfrontasi 1964. Namun, ia **tidak netral**. Artikel ini berfungsi sebagai alat propaganda atau

²² UK Parliament Hansard, *Indonesia And Malaysia: Mr Robert Kennedy's Visit Volume 254: Debated on Tuesday 28 January 1964*, January 28, 1964, <https://hansard.parliament.uk/Lords/1964-01-28/debates/6b917e49-03ff-4641-9754-16454d26bd4a/IndonesiaAndMalaysiaMrRobertKennedySVisit>.

²³ Edward C. Keefer, ed., *Foreign Relations of the United States. 1964/68, 26: Indonesia ; Malaysia-Singapore ; Philippines* / Ed. Edward C. Keefer, Department of State publication / United States, 1964, 14.

²⁴ Keefer, *Foreign Relations of the United States. 1964/68, 26*, 38.

setidaknya representasi dari kepentingan nasional Inggris untuk mempertahankan Federasi Malaysia dan mengecam kebijakan konfrontatif Indonesia.

Berikut adalah sumber yang telah diverifikasi otentik :

1) Sumber Tertulis Surat Kabar

- a) *Tudohan berat tanpa bukti dari Indonesia* (Berita Harian, 24 Januari 1963, Halaman 4).
- b) *PULOHAN RIBU KUTOK SUKARNO* (Berita Harian, 7 Oktober 1963, Halaman).
- c) *Sukarno's Three-Pronged Offensive- By Tengku* (The Straits Times, 12 Desember 1963).
- d) *Confrontations* (The Scotsman, 25 Januari 1964).
- e) *BUKTI2 PENGGANAS2 DATANG DARI INDONESIA* (Berita Harian, 23 Agustus 1963, Halaman 1).
- f) *Paratroopers from Indonesia Dropped in Malaya* (The Coventry Evening Telegraph, Selasa 02 September 1964).
- g) *More Indonesians Captured- Arms siezed by Troops* (The Scotsman, 22 September 1964).
- h) *Briton Killed in Sarawak Action- "Heavy Attack"* (The Scotsman, 28 April 1965).
- i) *Baik bagi negeri kita: Tun* (Berita Harian, 4 Oktober 1965, Halaman 1).

- j) *Indonesia Melts* (The Scotsman, 28 Mei 1965).
 - k) *Zaman baru hubungan Indonesia-Malaysia* (Berita Harian, 12 Agustus 1966, Halaman 4).
 - l) *Jakarta, Manila to Be Asked to Clarify* (The Straits Times, 17 September 1963).
 - m) *Perhubungan diplomatik putus dengan Indonesia* (Berita Harian, 18 September 1963).
 - n) *BERIBU2 RA'AYAT TUNJOK PERASAAN DI-KEDUTAAN INDONESIA, BAKAR GAMBAR SUKARNO, RAMPAS BHINEKKA TUNGGAL IKA* (Berita Harian 18 September 1963).
 - o) *70 Soldiers Killed-Claim* (Belfast Telegraph, 16 Juli 1964).
 - p) *Clash in Malaya with Indonesian Paratroopers* (The Coventry Evening Telegraph, 7 September 1964).
 - q) *Singapore Death Rise to 12* (The Coventry Evening Telegraph, 7 September 1964).
- 2) Sumber Tulisan Arsip
- a) *United Nations Treaty Registered 550-I-8029.*
 - b) *Letter dated 20 January 1965 from the First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Indonesia addressed to the Secretary-General S/6157.*

3. Interpretasi

Interpretasi sejarah adalah proses memahami dan menjelaskan peristiwa masa lalu dengan menggunakan sumber-sumber sejarah dan perspektif yang berbeda. Dalam interpretasi sejarah, para sejarawan tidak hanya mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder tetapi juga mencoba menyusun narasi atau menjelaskan alasan dan konsekuensi dari peristiwa tersebut.²⁵

Berdasar pada tujuan awal penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana surat kabar Britania (Inggris) dan Federasi Malaysia mengkonstruksi narasi tentang dinamika Konfrontasi, tulisan ini dianalisis dengan analisis *framing* atau pembingkai dengan konsep yang dikemukakan oleh Robert N. Entman.

Entman mendefinisikan framing sebagai proses seleksi dan penonjolan (*salience*) atas aspek-aspek tertentu dari suatu realitas.

"...To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described."

Secara sederhana, membingkai berarti memilih bagian tertentu dari sebuah peristiwa atau isu dan menonjolkannya dalam pesan, sambil mengabaikan aspek lainnya, untuk mengarahkan.²⁶

Robert M. Entman dapat dipahami melalui empat fungsi utamanya yang saling berkaitan. Keempat fungsi ini menjelaskan bagaimana sebuah bingkai kerja tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi secara aktif membangunnya untuk khalayak.

Pertama, sebuah frame berfungsi untuk Mendefinisikan Masalah (*Define Problems*). Frame bertindak sebagai penjaga gerbang yang memutuskan peristiwa atau isu mana yang layak menjadi perhatian publik dan mana yang tidak. Dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu, frame mengubah sebuah

²⁵ Prof DR Kuntowijoyo, *Pengantar ilmu sejarah* (Bentang Pustaka, 2005), 79.

²⁶ Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): 52, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

kejadian yang kompleks menjadi sebuah "masalah" yang dapat dikenali dan dipahami. Sebagai contoh, sebuah protes dapat dibingkai sebagai "problem ketertiban umum" atau sebagai "problem perlawanan terhadap ketidakadilan." Pilihan ini akan menentukan sejak awal bagaimana khalayak memandang esensi dari peristiwa tersebut. *Kedua*, frame berperan dalam Mendiagnosis Penyebab (*Diagnose Causes*). Setelah masalah didefinisikan, frame kemudian menunjuk pada "siapa" atau "apa" yang bertanggung jawab. Fungsi ini mencari kambing hitam atau akar persoalan, yang akan sangat mempengaruhi respons emosional dan kognitif audiens. Dalam konteks krisis ekonomi, misalnya, frame dapat mendiagnosis penyebabnya pada "keserakahan korporasi" atau pada "kebijakan pemerintah yang salah." Diagnosis sebab-akibat ini akan secara langsung mengarah pada fungsi ketiga. *Ketiga*, frame melakukan Penilaian Moral (*Make Moral Judgments*). Di tahap ini, frame tidak lagi deskriptif, melainkan menjadi normatif. Pelaku yang telah didiagnosis sebagai penyebab masalah kemudian dievaluasi secara moral. Frame akan menempatkan mereka dalam spektrum "baik" versus "buruk," "bersalah" versus "korban," atau "pahlawan" versus "penjahat." Dengan menggunakan nilai-nilai kultural yang dipegang masyarakat, frame memberikan penilaian etis yang memobilisasi perasaan dukungan atau kemarahan publik. *Keempat*, dan yang terakhir, frame Menyarankan Solusi (*Suggest Remedies*). Sebuah frame biasanya tidak berhenti pada menciptakan masalah, menyalahkan pelaku, dan menghakiminya; ia juga menawarkan jalan keluar. Fungsi preskriptif ini merekomendasikan serangkaian tindakan atau kebijakan tertentu sebagai treatment yang logis dan tepat untuk masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Jika sebuah konflik dibingkai sebagai "serangan teroris," maka solusi yang disarankan adalah "operasi militer."

Sebaliknya, jika dibingkai sebagai "konflik politik," maka solusinya mungkin "negosiasi dan diplomasi."²⁷

Frame berita timbul dalam dua level yaitu level Konsepsi yaitu Frame yang ada dalam pikiran pembuat pesan (skema), yang memengaruhi keputusan tentang apa yang akan dikatakan dan level Narasi yang berkenaan dengan teks berita dan penggunaan kata-kata didalamnya.²⁸

Dalam proses pembingkai terutama dalam pemberitaan oleh Inggris dan Malaysia dalam konteks Konfrontasi, media Inggris seperti The Scotsman dan The Coventry Evening Telegraph dan Media Malaysia terutama seperti Berita Harian dan The Straits Times menggambarkan Indonesia sebagai negara agresor yang mengganggu kedaulatan Malaysia. Pada narasinya terdapat kata-kata seperti *Terror*, *guerrilla*, *pengganas* dan segala kata yang berkonotasi negatif banyak ditulis dalam pemberitaan kedua negara.

4. Historiografi

Setelah melalui tahapan heuristik hingga interpretasi, tahapan selanjutnya adalah Historiografi. Historiografi merupakan tahapan pencatatan data-data sejarah yang telah diolah atau dalam arti sempit dikenal sebagai penyusunan sejarah.

Dalam penelitian yang berjudul “Konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam pemberitaan Surat Kabar Britania dan Federasi Malaysia Tahun 1963-1966” terdapat empat bab dalam penelitian ini :

BAB I PENDAHULUAN. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

²⁷ Entman, “Framing,” 52.

²⁸ Eriyanto, *Analisis Framing ; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Lkis Pelangi Aksara, 2002), 224.

BAB II JALANNYA KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA 1963-1966. Berisi tiga sub-bab yaitu Tahap Awal Konfrontasi, Tahap Eskalasi Konfrontasi dan Tahap Akhir dan Penyelesaian Konfrontasi.

BAB III KONFRONTASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM BINGKAI PEMBERITAAN BRITANIA DAN FEDERASI MALAYSIA. Berisi tiga sub-bab yaitu Reaksi Terhadap Konfrontasi, Aksi Konfrontasi dan Militeristik dan Tahap Akhir dan Penyelesaian Konfrontasi.

BAB IV PENUTUP. Berisikan kesimpulan dari semua bahasan hasil penelitian.

